

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



**HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE**  
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2022**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021- 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP 2022 ini merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pariaman, 23 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra. ELFI DELITA M. Farm. Apt  
NIP. 196608021993032005

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	3
C. Sistematika Pelaporan.....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	6
B. Rencana Kinerja tahunan ( RKT ) tahun 2022.....	8
C. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KENERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	30
C. Penghargaan.....	38
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	41
B. Langkah Kedepan .....	41

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah yang baik, upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah berupa penyampaian Laporan Kinerja. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

**1. Kelembagaan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jl. Zaini No. 07 Kuraitaji Pariaman, berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Kependudukan dan Keluarga daerah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 57 tahun 2016, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

---

## **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dibentuk melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pembinaan, pengawasan, dan penegendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
  - b. Perumusan kebijakan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - h. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Ringkasan Personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mempunyai susunan personil sebagai Berikut :

Tabel : 1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	0	SD	0	
2	II	0	SMP	0	
3	II	3	SLTA	3	
4	II	3	D-3	3	
5	III	2	SLTA	2	
6	III	2	D-3	2	
7	III	15	S.1	15	
8	III	1	S.2	1	
9	IV	4	S.1	4	
10	IV	4	S.2	4	
Jumlah		34		34	

#### B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tugas pokok yang diemban, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka menyelenggaraan urusan wajib pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis diantaranya :

1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK, pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.

- 
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB antara lain; angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, penggunaan alat dan obat metode montrasepsi mangka endek (non MKJP) terus meningkat, rendahnya kesertaan ber-KB pria.
  3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain; Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, masih banyaknya perkawinan usia muda, terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi, Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah, cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

### **C. Sistematika Pelaporan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi, Ringkasan Personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dan Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED) dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian

---

Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun;
- 8) Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**D**inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari periode Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Target-target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana tahun 2022 :

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Selanjutnya Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Visi**

*Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.*

---

Dengan mengacu pada batasan tersebut, sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026 maka visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

**“ PADANG PARIAMAN BERJAYA “**

Jadi visi tersebut merupakan pandangan kedepan yang bersifat menantang dan disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, sehingga diharapkan visi lebih realistis dalam arti dapat dicapai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## **2. MISI**

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi ke 6 Yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”**, dengan tujuan RPJMD nya adalah **“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal”** sedangkan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah **” Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”**. “ dengan indikator tujuan “laju pertumbuhan penduduk”.

Sedangkan sasaran strategisnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesertaan Ber- KB ( CPR )
- b. Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan
- c. Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )

## **3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2022 (RPJMD 2021-2026)**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.Meningkatnya kesertaan Ber-KB ( CPR )	Persentase Peserta KB aktif ( CPR )
			2.Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan (TFR)	Persentase Total Fertility Rate (TFR)
			3. Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif,Bersih,Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional,Aspirati Dan Trasparan	Biokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai LPPD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan DPPKB	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB Dari Inspektorat
		Opini WTP		

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
28/9/23	[Signature]	29/9/23	[Signature]	29/9/23	[Signature]

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pengendalian Pendudukan dan keluarga Berencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	
1.	Meningkatkan Kesertaan Ber – KB	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	65,75 %
2.	Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan (TFR)	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	2,34%
3.	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per 1000 Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn)	13
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan DPPKB	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB Dari Inspektorat	A

---

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, berikut di tampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (Terlampir).

**D**inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2022. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

**A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpestasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan Pengukuran dengan Scala Ordinal yaitu :

Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
'> 100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤100	Berhasil
'<80 s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
'< 70 s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebagai berikut :



## SASARAN 1.

Meningkatkan Kesertaan Ber-KB



Dalam rangka meningkatkan kepesertaan ber-KB, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa indikator kepesertaan ber-KB aktif (CPR) di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, analisa capaian indikator kepesertaan ber-KB aktif (CPR) sebagai berikut :

### 1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel : 3.1  
Capaian Kinerja indikator kepesertaan ber- KB aktif  
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB (CFR)	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	%	65,75	65,25	99,23	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator persentase Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR) Kabupaten Padang Pariaman hampir mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 65,25% dari target yang ditetapkan (65,75%), dengan kategori Berhasil (99,23 %).

Hal ini disebabkan karena adanya akseptor KB yang sudah mandiri seperti penggunaan alat kontrasepsi pil, kondom, suntik dan telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB PUS muda.

### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/7-23	[Signature]	2/7-23	[Signature]	20/7-23	[Signature]



Uraian: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan kualitas pelayanan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana kegiatan pada tahun 2022.

### 1. Membedakan target dan indikator kinerja yang akan dicapai

Tabel 1.1  
Gapan kinerja indikator kepatuhan dan KPI 2022  
Tahun 2022

No	Kategori	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Interpretasi
			Target	Realisasi	
1	Manajemen	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelembagaan	85,25	85,25	Stabil

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah indikator kepatuhan dan KPI 2022. Indikator ini akan diukur dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika terdapat selisih antara target dan realisasi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.



Tabel : 3.2.  
 Capaian Kinerja indikator kepesertaan ber- KB aktif tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1.	Meningkatkan Kesertaan KB	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	%	65,69	65,75	65,25	99,23	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya lebih sedikit rendah dari tahun 2021 yaitu 65,25%, sedangkan tahun 2021 sebesar 65,69%. artinya dengan interpretasi capaian berhasil ( 99,23 ).

Hal ini disebabkan adanya Akseptor yang membuka Alat Kontrasepsi agar bisa hamil karena ingin anak segera, adanya pasangan yang baru menikah lebih banyak yang menginginkan anak segera.

### 3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

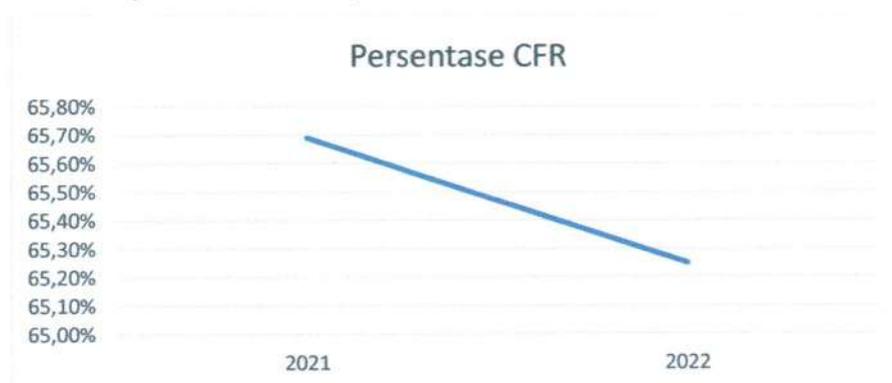
Tabel : 3.3  
 Capaian Kinerja indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2022 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah		Realisasi Jangka Menengah	Realisasi 2022	Interpretasi
				2021	2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1.	Meningkatkan Kesertaan KB	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	%	65%	65,75%	65,69 %	65,25%	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 65,69 % menjadi 65,25, gambar pencapaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2021 - 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1

Capaian indikator Kepesertaan KB Aktif Tahun 2021-2022



Dari grafik diatas menunjukkan adanya penurunan kepesertaan ber-KB di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Adanya penyebab penurunan dari tahun 2021-2022 itu dikarenakan karena adanya pasangan yang baru menikah lebih banyak yang menginginkan anak segera disamping itu adanya Akseptor yang membuka alat kontrasepsi agar bisa hamil karena ingin punya anak segera.

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel : 3.4.

Capaian Kinerja indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2022 dibandingkan dengan target Nasional

N o	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Nasional	Realisasi 2022	Interpestasi
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1.	Meningkatkan Kesertaan KB	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	%	62.54%	65,25%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih tinggi dari target nasional yaitu 65,25 % dari target nasional 62,54 %.

---

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Faktor Keberhasilan Pencapaian CPR adalah karena adanya dukungan anggaran BOKB , dukungan sumber daya manusia ( petugas lapangan KB, kader KB ), ketersediaan alat-alat kontrasepsi di faskes dan adanya dukungan dari lintas sektoral seperti kegiatan GERAK IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES dan lokakarya mini di kampung KB.

Sedangkan Penurunan Pencapaian CPR dari tahun sebelumnya dan sedikit rendahnya realisasi dibandingkan target adalah adanya Akseptor yang membuka Alat Kontrasepsi agar bisa hamil karena ingin anak segera, adanya pasangan yang baru menikah lebih banyak yang menginginkan anak segera dan masih adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki sehingga menyebabkan rendahnya peserta KB.

Keberhasilan ini juga melibatkan dinas dan instansi terkait seperti :

- (a) DINKES dan RSUD, terkait dengan pemberian pelayanan KB, penyediaan tenaga pelaksana KB, penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan KB ;
- (b) TNI (Kodim 0308), terkait dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaksanakan KB terutama metoda operasi pria (MOP) ;
- (c) Organisasi Profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk keterlibatan memberikan pelayanan alat kontrasepsi kepada akseptor KB ;
- (d) Tim penggerak PKK Kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan dan Nagari, serta kader KB dalam bentuk menggerakkan masyarakat untuk aktif ber-KB.

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 99,23% dan realisasi keuangan sebesar 80,94%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 4.430.574.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.586.286.589,-. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

**7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan sasaran kepesertaan Ber-KB ( CPR ) antara target dan realisasi adalah kurang sedikit dari target yang ditentukan yaitu sebesar 65,25 %. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kepersetaan ber-KB Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2022, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dianggarkan sebesar Rp.1.305.215.000 dan terealisasi Rp.1.220.621.789 atau sebesar (93,52%).
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dianggarkan sebesar Rp.528.150.000 dan terealisasi Rp.485.411.100 atau sebesar (91,91 %)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan sebesar Rp.2.140.209.000 dan terealisasi Rp.1.551.976.200 atau sebesar (72,52 %).
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dianggarkan sebesar Rp.457.000.000 dan terealisasi Rp.328.277.000 atau sebesar (71,83%).

Pada tahun 2022 realisasi pencapaian pelayanan KB aktif sebanyak 43.702 dari target 21.274 dengan persentase capaian 205,42 %, sedangkan realisasi capaian per jenis kontrasepsi adalah sebagai berikut :

1	Pelayanan IUD	:	dari 1.663 target yang ditetapkan, tercapai 2.241 dengan persentase sebesar 134,8 %
2	Pelayanan MOW	:	dari 1.639 target yang ditetapkan tercapai 1.394 dengan persentase 85,05 %
3	Pelayanan MOP	:	dari 92 target yang ditetapkan tercapai 354 dengan persentase 384,78 %
4	Pelayanan KONDOM	:	dari 744 target yang ditetapkan tercapai 4.043 dengan persentase 543,41 %
5	Pelayanan IMPLANT	:	dari 902 target yang ditetapkan tercapai sebanyak 6.871 dengan persentase sebesar 761,75 %
6	Pelayanan SUNTIK	:	dari 11.586 target tercapai sebanyak 17.509 dengan persentase sebesar 151,12 %
7	Pelayanan PIL	:	dari 2.839 target tercapai sebanyak 11.290 dengan persentase sebesar 397,66 %

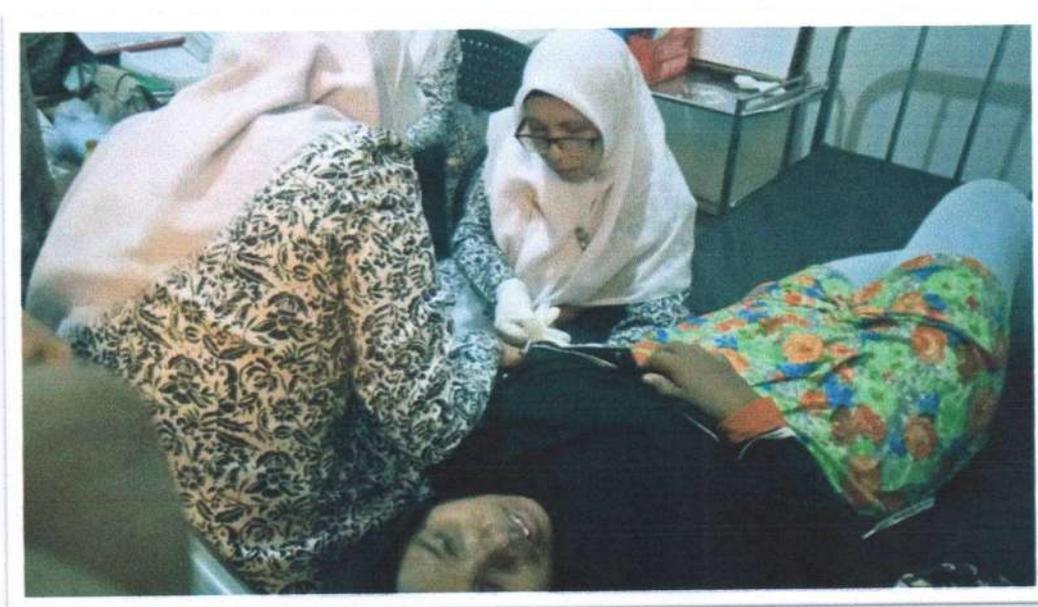
**REKAPITULASI CAPAIAN PESERTA KB AKTIF  
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	MIX KONTRASEPSI							
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIK	PIL	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LUBUK ALUNG	256	115	80	457	1.290	2.674	692	5.564
2	NAN SABARIS	212	124	15	108	343	1.294	436	2.532
3	2x11 ENAM LINGKUNG	33	32	12	108	690	822	643	2.340
4	VII KOTO SUNGAI SARIK	510	167	46	239	343	968	1.002	3.275
5	V KOTO KAMPUNG DALAM	153	56	44	183	415	1.146	873	2.870
6	SUNGAI GERINGGING	124	133	27	97	590	1.045	660	2.676
7	SUNGAI LIMAU	64	46	17	214	96	983	1.034	2.454
8	IV KOTO AUR MALINTANG	85	136	18	503	517	507	770	2.536
9	BATANG ANAI	25	30	16	158	1.264	2.317	1.620	5.430
10	BATANG GASAN	198	55	9	120	217	507	500	1.606
11	V KOTO TIMUR	37	75	20	155	172	572	597	1.628
12	ULAKAN TAPAKIS	106	115	6	455	108	590	435	1.815
13	PATAMUAN	56	34	4	192	235	750	226	1.497
14	ENAM LINGKUNG								

		101	68	2	543	56	834	667	2.271
15	SINTOGA	71	67	7	275	144	663	297	1.524
16	2X11 KAYU TANAM	204	113	30	176	326	1.489	668	3.006
17	PADANG SAGO	6	28	1	60	65	348	170	678
<b>KABUPATEN</b>		2.241	1.394	354	4.043	6.871	17.509	11.290	43.702

Berbagai macam bentuk program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam upaya pencapaian terhadap Peserta KB aktif, yaitu meningkatkan Capaian tingkat pemakaian peserta KB aktif bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Padang Pariaman, adapun upaya bentuk –bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi MKJP.

Pemasangan alat kontrasepsi implant di targetkan 2.711 orang tercapai sebesar 6.871 orang dengan persentase sebesar 253,4 %



Pemasangan alat kontrasepsi IUD di targetkan 1.663 tercapai sebesar 2.241 dengan presentase sebanyak 134,8%.



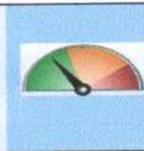
Pelayanan Metoda Operasi Wanita( MOW ) di targetkan 1.639 orang tercapai 1.394 orang dengan persentase 85,05 %



Pelayanan KB dalam rangka bulan bhakti IBI



**SASARAN 2.**  
Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja  
(15-19 Tahun)



Dalam rangka menurunkan angka melahirkan di usia remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR ) yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dimana yang menjadi sasarannya disamping meningkatkan kesertaan ber-KB juga menurunnya angka melahirkan di usia remaja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai kegiatan, sebagai ukuran keberhasilan indikator yang ditetapkan berupa menurunnya angka melahirkan di usia remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR ).

Kelompok remaja di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 baik di lingkungan institusi pemerintah (lingkungan sekolah) maupun di luar sekolah serta kelompok bina keluarga mempunyai kelompok remaja berjumlah 399 kelompok, yang terdiri dari 106 kelompok bina keluarga, 41 kelompok bina remaja , 102 kelompok bina lansia , 61 kelompok PIK-R, 75 kelompok UPPKA dan 14 kelompok PPKS, analisa capaian indikator Angka Melahirkan di Usia remaja sebagai berikut :

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/7/23	<i>[Signature]</i>	23/7/23	<i>[Signature]</i>	21/7/23	<i>[Signature]</i>

## 1. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel : 3.5  
Capaian Kinerja indikator Per 1000 Angka Melahirkan di Usia Remaja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per 1000 Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Tahun) melahirkan	Per 1000	13,0	2,34	182	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator angka melahirkan di usia remaja ( 15-19 tahun )/ ASFR di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 2,34 per 1000 dari target yang ditetapkan yaitu 13 per 1000, artinya persentase ASFR di padang pariaman lebih rendah dari target yang mana berarti persentase melahirkan di usia remaja (15-19 Tahun ) menurun. dengan nilai skor 182% artinya dapat di interprestasikan kategori sangat berhasil.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Tabel : 3.6  
Capaian Kinerja indikator per1000 usia remaja 15-19 Tahun melahirkan Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per1000 usia remaja 15-19 Tahun melahirkan	Per1000	6,31	13	2,34	182	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya

pencapaian tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 dimana angka melahirkan diusia remaja semakin menurun dengan interpretasi capaian ini sangat berhasil ( 182 % ).

Adanya penurunan angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 jika di bandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena adanya dukungan anggaran untuk kegiatan - kegiatan dilapangan seperti kegiatan penyuluhan PIK-R, pembinaan kelompok keluarga yang mempunyai remaja dan dukungan dari Dinas Pendidikan dalam rangka mengikutsertakan remaja-remaja dalam ajang pemilihan duta genre mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat Nasional.

### 3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel : 3.7

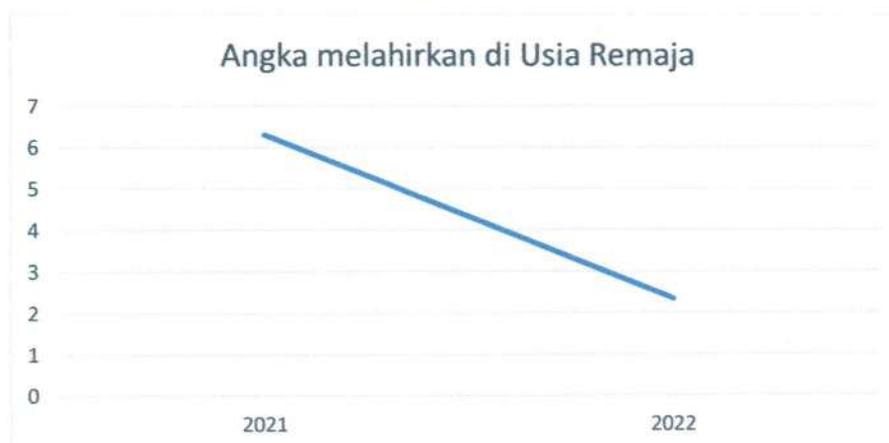
Capaian Kinerja indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah		Realisasi Jangka Menengah	Realisasi 2022	Interpe stasi
				2021	2022	2021		
1	2	3	4	5	6	12	18	19
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Per1000 Usia remaja 15-19 Tahun melhirkan	Per 1000	14	13	6,31	2,34	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari target semula tahun 2021 yaitu 14 menjadi 13 tahun 2022, dan realisasi pun juga dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dari 6,31 menjadi 2,34 ,gambar pencapaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2021 - 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2

Capaian indikator Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn )  
Tahun 2021-2022



Dari grafik diatas menunjukkan adanya penurunan angka melahirkan di usia remaja di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari lintas sektoral seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, serta dukungan anggaran dari bantuan operasional keluarga berencana ( BOKB ) dalam bentuk pertemuan-pertemuan anak-anak remaja.

**4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel : 3.8

Capaian Kinerja indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Nasional	Realisasi 2021	Interpestasi
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	Angka Melahirkan di Usia Remaja	Per1000	21	2,34	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih rendah dari target nasional yaitu 2,34 per1000 dari target nasional 21 .

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

---

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena :

- a. Adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekali tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Jumlah wanita umur 15-19 Tahun yang melahirkan terjadi penurunan yang signifikan dari 114 orang menjadi 48 orang.
- c. Terjadi peningkatan rata-rata usia wanita kawin pertama dari 25,44 menjadi 25,496 %.
- d. Penurunan angka stunting dari 28,31 % menjadi 25%.
- e. Kerjasama Lintas Sektor.
- f. Dukungan Pemerintah daerah.
- g. Dukungan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- h. Adanya peran orang tua asuh, bagi anak yang menderita Gizi buruk yang beresiko tinggi seperti kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Bupati Padang Pariaman, Wakil Bupati Padang Pariaman dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Pariaman.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kontribusi dinas dan instansi terkait seperti :

- a. DISDUKCAPIL, terkait ketersediaan data penduduk menurut kelompok umur ;
- b. Seluruh Kecamatan dan Nagari, terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- c. KEMENAG, terkait dengan jumlah data wanita perkawinan pertama.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 182% dan realisasi keuangan sebesar 36,42%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp.1.964.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp.715.460.848,-. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022, ada beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 di Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

---

dalam rangka menurunkan capaian indikator angka melahirkan di usia remaja tahun 2022 di Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman program yang mendukung indikator ini adalah program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.964.580,000 dan terealisasi Rp. 715.460.848 atau sebesar (72 %)

Dibawah ini disajikan beberapa dokumen photo-photo kegiatan sebagai berikut :

#### Pemilihan GenRe Kabupaten Padang Pariaman



#### Juara Favorit Putra Genre Tk. Nasional Tahun 2022



Pembinaan Terhadap Kelompok Bina Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia



**SASARAN 2.** Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan



Dalam rangka menurunkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dimana yang menjadi indikatornya adalah Persentase Total Fertility Rate (TFR). Untuk mencapai sasaran tersebut telah berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai kegiatan, sebagai ukuran keberhasilan indikator yang ditetapkan berupa menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Analisa capaian indikator Persentase Total Fertility Rate (TFR) adalah sebagai berikut :

REVIU BERLUNJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/23/21	[Signature]	23/1/23	[Signature]	20/5/21	[Signature]

1. Capaian Kinerja Indikator Presentase Total Fertility Rate ( TFR ) Tahun 2022

Tabel : 3.9  
 Capaian Kinerja indikator Presentase Total Fertility Rate (TFR)  
 Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,34	1,93	117,52	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator persentase Total Fertility Rate ( TFR ) Kabupaten Padang Pariaman bisa lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,93 % karena semakin menurun angka TFR berarti semakin berhasil upaya pemerintah Kabupaten padang pariaman untuk menekan angka kelahiran. dari target yang ditetapkan, capaian kinerja indikator persentase Total Fertility Rate ini bisa diinterpretasi dengan kategori Sangat Berhasil ( 117,52 % ).

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD, Implant , pil, kondom, suntik dan telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB PUS muda ( umur 22 - 35 ). Serta pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

2. Capaian Kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021

Tabel : 3.10  
 Capaian Kinerja indikator presentase Total Fertility Rate Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,28	2,34	1,93	117,52	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate (TFR) ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya lebih rendah dari tahun 2021 yaitu 1,93, sedangkan tahun 2021 sebesar 2,34. artinya pencapaian tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 dimana angka melahirkan diusia remaja semakin menurun dengan interpretasi capaian ini sangat berhasil ( 117,52 % ).

3. Capaian Kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2022 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

Tabel : 3.11  
 Capaian Kinerja indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2022 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah		Realisasi Jangka Menengah	Realisasi 2022	Interpretasi
				2021	2022	2021		
1	2	3	4	5	6	12	18	19
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,38	2,34	2,28	1,98	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi penurunan dari tahun

2021 ke tahun 2022 dari target semula tahun 2021 yaitu 2,38 menjadi 2,34 tahun 2022, dan realisasi pun juga dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dari 2,28 menjadi 1,98 ,gambar pencapaian indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2021 - 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2

Capaian indikator Presentase Total Fertality Rate Tahun 2021-2022



4. Capaian Kinerja indikator Total Fertility Rate tahun 2022 dibandingkan dengan target nasional

Tabel : 3.11

Capaian Kinerja indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2022 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Nasional	Realisasi 2022	Interpesta si
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1	Menurunnya Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan	Presentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21%	1,98%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih rendah dari target nasional yaitu 1,98 % dari target nasional 2,21 %.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ketersediaan alat-alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, adanya peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), adanya dukungan Petugas Lapangan KB, Meningkatnya akses layanan kontrasepsi, Adanya pembinaan terhadap

---

anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekali tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 117,52% dan realisasi keuangan sebesar 67,69%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 6.651.315.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.506.853.168,-. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang menunjang pada indikator ini adalah program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Program Pengendalian Penduduk ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp Rp. 256.161.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 205.115.731,- atau 80,1%. Kemudian Program Pembinaan Keluarga Berencana terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yaitu Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB atau PLKB), Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan jumlah anggaran 4.430.574.000 dari jumlah tersebut direalisasikan sebesar 3.586.286.589 dengan presentase 77,4 %. Dan Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga

sejahtera dengan anggaran program ini sebesar Rp. 1.964.580.000 dan realisasinya sebesar Rp. 715.460.848 dengan persentase 41 %. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.



**SASARAN 4.** Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan DPPKB



Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja ditetapkan dengan indikator kinerja berupa : Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB dari Inspektorat.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Datinis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
21/2/23	<i>[Signature]</i>	21/2/23	<i>[Signature]</i>	21/2/23	<i>[Signature]</i>

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022				Interprestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat terlihat Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 realisasinya mencapai 100% dengan nilai A dan interprtetasi Sangat Berhasil. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah nilai A dengan nilai 89 dan berhasil direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini membuktikan kesuksesan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Sasaran Strategis ke 4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja dengan indikator sasaran Hasil penilaian evaluasi SAKIP.

2. Membandingkan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022			Interpe stasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	100	Sangat Berhasil

Realisasi kinerja pada indikator kinerja sasaran Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2021 adalah A. Dan nilai pada tahun 2022 adalah A artinya mencapai target yang ditetapkan.

3. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2022 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah		Realisasi Jangka Menengah	Realisasi 2022	Interpe stasi
				2021	2022	2021		
1	2	3	4	5	6	12	18	19
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	B	A	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat ini ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, dapat mencapai target yang ditetapkan, artinya dapat diinterpretasikan sangat berhasil.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2022 Hasil Penilaian Sakip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan SAKIP Perangkat Daerah.

Selain itu keberhasilan juga disebabkan adanya dukungan anggaran dari program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, tidak hanya terbatas pada APBD tetapi juga sumber pendanaan lainnya.

Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian kegiatan
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.723.449.090,00</b>	<b>4.611.101.772</b>	<b>97,62</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.001.000	90.783.370	87,29	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dokumen anggaran SKPD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.851.000	19.860.000	95,25	Tersusunnya renstra Perangkat Daerah
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.250.000	12.322.000	86,47	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.500.000	9.504.000	76,03	Tersusunnya RKA Perubahan SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.750.000	9.759.750	83,06	Tersusunnya Dokumen DPA SKP
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.500.000	7.898.000	68,68	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.150.000	31.439.620	94,84	Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.882.727.615	3.837.241.259	98,83	Terlaksananya adm keuangan perngkat daerah
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.768.127.615	3.722.641.259	98,79	Terlaksananya pembayaran gaji ASN
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.600.000	114.600.000	100,00	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.150.000	0	0	Terselenggaranya adm kepegawaian perangkat daerah
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.150.000	0	0	Terlaksananya bimtek ASN
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.864.805	215.694.893	95,92	Terselenggaranya adm umum perangkat daerah
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.480.805	26.908.035	97,92	Tersediannya Peralatan dan perlengkapan kantor
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.500.000	15.500.000	100,00	Tersediannya Peralatan Rumah Tangga
	c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	4.440.000	59,20	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	d. Fasiitasi Kunjungan Tamu	1.860.000	1.860.000	100,00	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.524.000	166.986.858	96,79	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.587.615	307.120.875	92,07	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.644.815	20.644.815	100,00	Tersediannya Jasa Surat Menyurat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.200.000	46.029.700	97,52	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.620.000	14.620.000	100,00	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.122.800	225.826.360	89,93	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.118.055	160.261.375	94,21	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.432.250	45.371.875	86,53	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.195.805	79.408.125	96,61	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.490.000	35.481.375	99,98	Tersediannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	256.161.000	205.115.731	80,07	Menurunnya Angka kelahiran ( Total Fertility Rate )
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas	134.606.000	125.211.231	93,02	Tersusunnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

	Penduduk				
	a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	22.500.000	21.480.981	95,47	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	13.856.000	11.442.000	82,58	Tersedianya Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
	c. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	13.000.000	8.233.200	63,33	Tersedianya Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
	d. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	10.750.000	10.731.750	99,83	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
	e. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	74.500.000	73.323.300	98,42	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	121.555.000	79.904.500	65,74	Tersedianya perkiraan pengendalian penduduk
	a. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	15.250.000	14.810.000	97,11	Terlaksananya sosialisasi dampak kependudukan

	b. Penyediaan data dan informasi keluarga	3.955.000	3.955.000	100	Tersedianya data dan informasi keluarga
	c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.350.000	61.139.500	59,74	Tersedianya data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
<b>B</b>	<b>Progam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>4.430.574.000</b>	<b>3.586.286.589</b>	<b>77,4</b>	<b>Meningkatnya kepesertaan KB aktif</b>
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.305.215.000	1.220.621.789	93,52	Tersedianya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.358.800	99,63	Tersedianya Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	42.500.000	41.568.100	97,81	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.600.000	99,94	Tersedianya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	265.200.000	247.558.200	93,35	Terlaksananya mekanisme program operasioanal KKBPK
	Pegelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluh KKBPK	867.000.000	801.646.639	92,46	Tersedianya Pegelolaan Operasional dan Sarana Di Balai Penyuluh KKBPK

	Pengendalian Program KKBPK	55.500.000	54.890.050	98,90	Tersedianya Pengendalian Program KKBPK
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	528.150.000	485.411.100	91,91	Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan
	a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	16.500.000	15.738.100	95,38	Terlaksana pembinaan tenaga lini lapangan
	b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	511.650.000	469.673.000	91,80	Terlaksana pembinaan tenaga kader lapangan
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.137.859.000	1.552.026.200	72,60	Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
	a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000	19.752.400,00	99,76	Terlaksananya pendistribusian obat ke faskes
	b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	966.539.000	636.356.800	65,84	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	18.500.000	18.449.950	99,73	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
	d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.060.670.000	803.560.500	75,76	Terlaksananya penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
	e. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.450.000	31.124.750	98,97	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan

	f. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	9.500.000	9.111.000	95,91	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
	g. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	17.500.000	17.423.000	99,56	Terlaksananya Pelayanan KB Bergerak
	h. Peningkatan Kesertaan KB Pria	16.250.000	16.197.800	99,68	Terlaksananya Pelayanan KB pria
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	457.000.000	328.277.500	71,83	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat
	a. Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	44.500.000	44.377.150	99,72	Meningkatnya organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	18.250.000	18.190.500	99,67	Meningkatnya integrasi pembangunan lintas sektoral di Kampung KB
	c. Pembinaan Terpadu Kampung KB	32.000.000	31.074.500	97,11	Meningkatnya koordinasi lintas sektoral di Kampung KB
	d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	362.250.000	234.635.350	64,77	Terlaksananya Pengelola Program KKBPK di Kampung KB
C	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.964.580.000</b>	<b>715.460.848</b>	<b>36,42</b>	<b>Menurunnya Angka melahirkan diusia remaja (15-19 Tahun)</b>
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.964.580.000	715.460.848	36,42	Meningkatnya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga	12.500.000	10.989.500	87,92	Meningkatnya pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.250.000	11.243.000	78,90	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan
c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.000.000	12.786.000	91,33	Meningkatnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.846.330.000	607.589.998	32,91	Tersediannya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R)	13.750.000	10.589.500	77,01	Tersediannya biaya operasional bagi kelompok kegiatan dan ketahanan kesejahteraan keluarga
f. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	13.750.000	13.165.000	95,75	Meningkatnya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Keluarga/UPPKS)				
g. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	50.000.000	49.097.850	98,20	Meningkatnya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
<b>JUMLAH</b>	<b>11.374.764.090</b>	<b>9.117.964.940</b>	<b>80,2</b>	

### C. PENGHARGAAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 memperoleh penghargaan sebagai berikut :

Penghargaan dari BKKBN Pusat Favorit Duta GenRe Indonesia Putera 2022



Penghargaan Ayah Bunda GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Penghargaan Kabupaten terbaik 1 pengelolaan UPPKA Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Runner Up 2 Duta GenRe Putra Sumatera Barat Tahun 2022



## **A. KESIMPULAN**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator Kepesertaan Ber-KB aktif ( CPR ) 65,25 % dari target 65,75 %, dengan kategori Berhasil . Hal ini disebabkan karena adanya akseptor KB yang sudah mandiri seperti penggunaan alat kontrasepsi pil, kondom, suntik dan telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB PUS muda.
2. Capaian indikator angka melahirkan di usia remaja dapat mencapai 2,34 per1000 dari target yang ditetapkan yaitu 13 per1000. dengan nilai skor 182% artinya dapat di interprestasikan kategori berhasil.Ini artinya pemerintah kabupaten padang pariaman dapat menekan angka melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun karena angka yang dicapai dapat lebih rendah dari target yang ditetapkan.
3. Capaian indikator presentase Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 1,93 % dari target yang ditetapkan yaitu 2,34%. dengan nilai skor 117,52% artinya dapat di interprestasikan kategori berhasil.Ini artinya pemerintah kabupaten padang pariaman dapat menekan Total Fertility Rate karena angka yang dicapai dapat lebih rendah dari target yang ditetapkan.

## **B. Langkah Kedepan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
2. Meningkatkan peran kader dilapangan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

---

3. Meningkatkan koordinasi ke instansi terkait seperti BKKBN Perwakilan Sumatera Barat.

4. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 23 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra. ELFI DELITA, M.Farm, Apt  
NIP. 196608021993032005